



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



# LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

**2023**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PONTIANAK



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak

Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum menggambarkan kinerja yang ideal. Pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak guna mewujudkan "***good governance***" di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, Februari 2024  
Kepala Dinas komunikasi dan Informatika  
Kota Pontianak

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196601271986031009



## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1    Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
1.2    Aspek Strategis Organisasi	1
1.3    Kegiatan dan Produk Organisasi	3
1.4    Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi	10
1.5    Sistematika Penyajian	20
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1    Rencana Strategis	22
2.1.1    Tujuan dan Sasaran	23
2.1.2    Strategis dan Kebijakan	23
2.2    Perjanjian Kinerja	25
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1    Capaian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	37
3.2    Realisasi Anggaran	68
BAB IV    PENUTUP	71
4.1    Kesimpulan	71
4.2    Saran	73
LAMPIRAN	
Rencana Strategis 2023-2024 Penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2023	

**DAFTAR TABEL**

		<b>Hal.</b>
Tabel 1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	2
Tabel 1.2	Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	3
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	15
Tabel 1.4	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	19
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2023	26
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Urusan Penunjang Tahun 2023	32
Tabel 3.1	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023	38
Tabel 3.2	Realisasi Program Anggaran, Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi Tahun Anggaran 2023	38
Tabel 3.3	Capaian Indeks SPBE Realisasi Tahun 2022 dan Target serta Realisasi Tahun 2023	49
Tabel 3.4	Realisasi Indeks SPBE Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2021-2023	51
Tabel 3.5	Perbandingan IKU Indeks SPBE Antara Realisasi Dengan Target Nasional Tahun 2023	52
Tabel 3.6	Permasalahan dan Solusi	52
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi pada Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dan Penyelenggaraan Statistik Sektor Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Tahun 2023	56
Tabel 3.8	Capaian Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Realisasi Tahun 2022 dan Target serta Realisasi Tahun 2023	64
Tabel 3.9	Realisasi Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2021-2023	65
Tabel 3.10	Perbandingan IKU Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Antara Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2023	66
Tabel 3.11	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023	68



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal.</b>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	11
Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	14
Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	15



## DAFTAR GRAFIK

		<b>Hal.</b>
Grafik 1.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	14
Grafik 1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Pendidikan	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **1.2 Aspek Strategis Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja per tahunnya.

Kemudian adanya penyesuaian anggaran, Dinas Komunikasi juga telah melakukan revisi Rencana Kerja Tahun 2023 sehingga terjadi penyesuaian target kinerja tahunan menyesuaikan dengan penyesuaian anggaran tersebut dimana beberapa sub kegiatan yang diadakan yang juga menyebabkan target kinerja menyesuaikan kondisi tersebut.

Selain itu berdasarkan hasil evaluasi tim SAKIP Pemerintah Kota Pontianak, dilakukan revisi atau evaluasi terkait penentuan indikator atau target kinerja kegiatan sehingga dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian sebagaimana hasil rekomendasi atau evaluasi tersebut.

Sebagaimana tertera pada dokumen-dokumen tersebut, maka aspek strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pontianak

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	71,74	74,74	77,74	80,74	83,74
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan RENSTRA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Tabel 1.2

## Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
<b>Misi 3 :</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas</b>					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	77,74	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sumber: Data Olahan RENSTRA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024

### 1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagaimana yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

### 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

## 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

### 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

#### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

##### 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

#### 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

##### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

##### 5.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Adanya instruksi untuk melakukan realokasi anggaran, maka program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengalami perubahan menyesuaikan dengan alokasi anggaran pada APBD Perubahan adalah sebagaimana berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Layanan Hubungan Media
  - Manajemen Komunikasi Krisis
  - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
3. Program Aplikasi Informatika
- 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
  - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

## 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

### 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

## 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 5.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

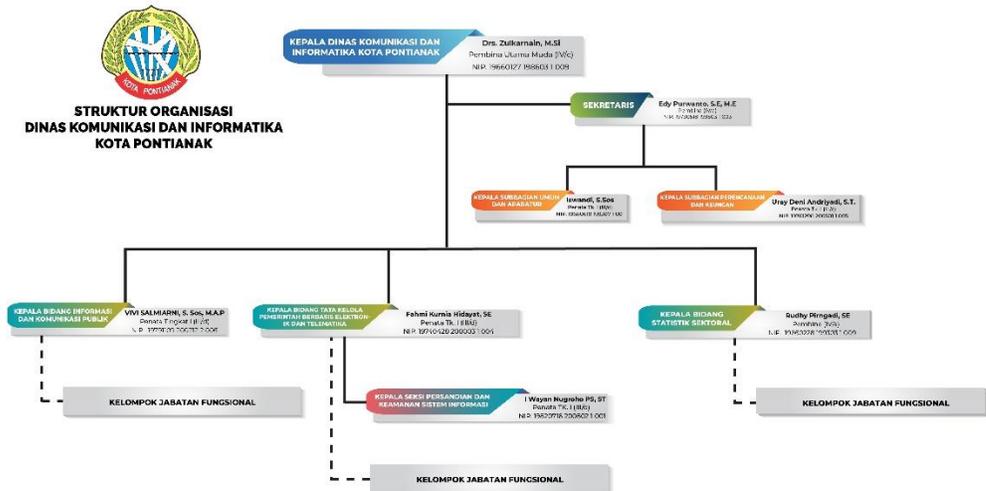
Terkait hal tersebut terdapat pengurangan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk tahun 2022. Semula 5 program 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan menjadi 5 program 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan atau berkurang sebanyak 3 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

#### **1.4 Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

## Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



Sumber: Subbag Umum dan Aparatur

Sebagaimana tercantum Keputusan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Sekretaris mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memiliki fungsi:

- perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik;

- b. perumusan rencana kerja dibidang informasi dan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang informasi dan komunikasi publik;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang informasi dan komunikasi publik;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang informasi dan komunikasi publik;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang informasi dan komunikasi publik;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang informasi dan komunikasi publik;
- h. pengelolaan administrasi dibidang informasi dan komunikasi publik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang informasi dan komunikasi publik yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik dan Telematika memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- b. perumusan rencana kerja dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;

- h. pengelolaan administrasi dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Statistik Sektoral memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang statistik sektoral;
- b. perumusan rencana kerja dibidang statistik sektoral;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang statistik sektoral;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang statistik sektoral;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
- h. pengelolaan administrasi dibidang statistik sektoral; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang statistik sektoral yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menjalankan tugas yang telah diamanatkan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung oleh berbagai sumberdaya antara lain Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, serta Anggaran.

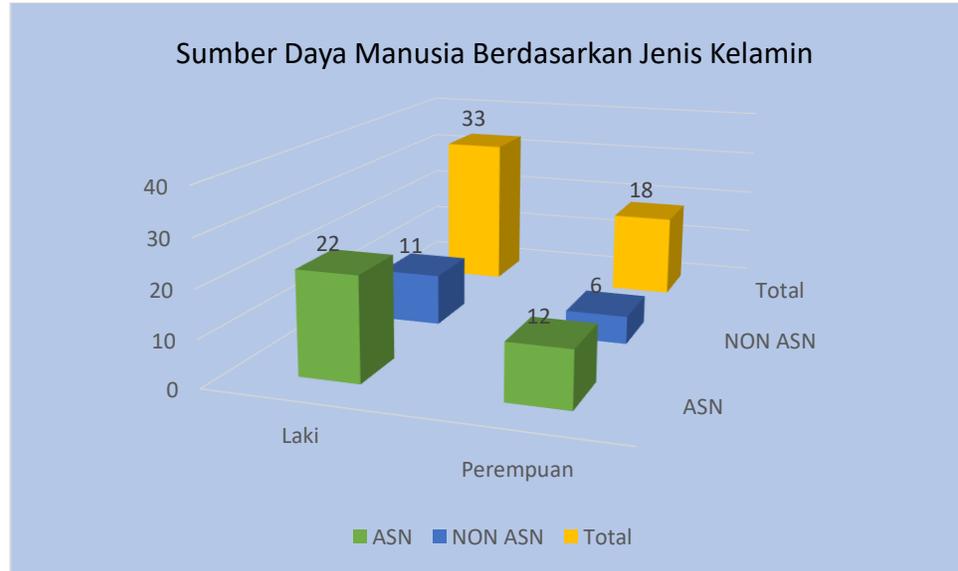
a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung oleh 33 orang ASN dan 18 orang tenaga kontrak atau jasa orang perorangan.

Dari 33 orang ASN tersebut terdiri dari 22 orang ASN dengan jenis kelamin laki-laki dan 11 orang ASN dengan jenis kelamin perempuan. Untuk tenaga kontrak atau jasa orang per orangan terdiri dari 12 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang berjenis kelamin perempuan.

Gambar 1.2

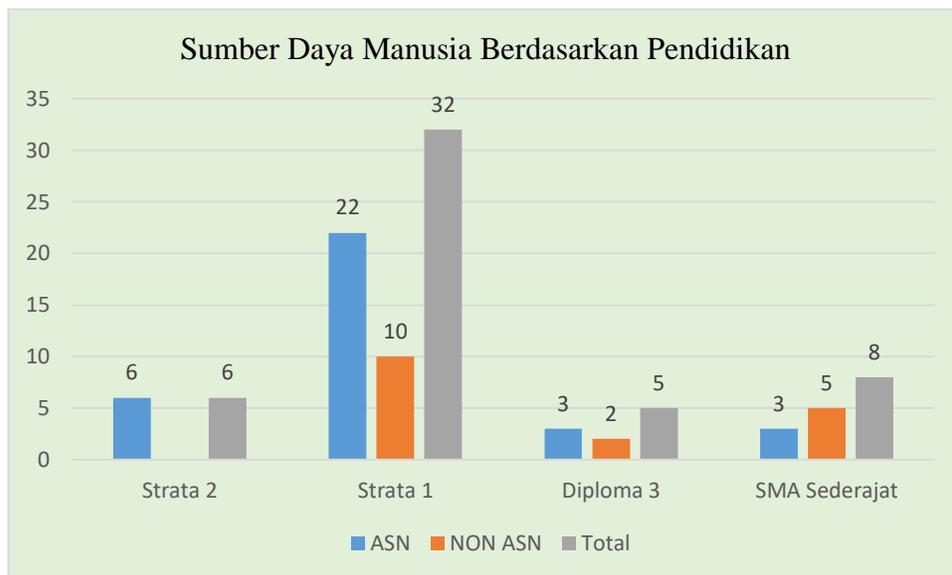
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin



Sumber: Data Olahan Subbag. Umum dan Aparatur

Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai/ ASN adalah lulusan S2 sebanyak 6 orang, lulusan S1 sebanyak 22 orang, lulusan diploma sebanyak 3 orang untuk ASN dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk tenaga Non ASN, lulusan S1 sebanyak 10 orang, lulusan D3 sebanyak 2 orang dan lulusan SMA sederajat sebanyak 5 orang.

Gambar 1.3  
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Pendidikan



Sumber: Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	Portable Compressor	Unit	1
2	Mesin Bor Beton	Unit	1
3	Mobil Station Wagon	Unit	1
4	Sepeda Motor	Unit	1

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
5	Mesin Gerinda Tangan	Unit	1
6	Mesin Bor Tangan	Unit	1
7	Tool Kit Box	Unit	1
8	Special Tools	Unit	2
9	Perkakas Bengkel	Unit	2
10	Alat Ukur Universal (Multimeter)	Unit	1
11	Alat Ukur/Pembanding	Unit	1
12	Alat Ukur Lain-lain	Unit	2
13	Mesin Absen	Unit	6
14	Mesin Fotokopi Folio	Unit	1
15	Mesin Hitung lainnya	Unit	1
16	Lemari Besi / Metal	Unit	5
17	Rak Besi	Unit	4
18	Filling Cabinet Besi	Unit	12
19	Brankas	Unit	1
20	Lemari Kaca	Unit	1
21	CCTV	Unit	5
22	Alat Kantor Lainnya	Unit	123
23	White Board	Unit	1
24	Alat Penghancur Kertas	Unit	1
25	Alat Pengaman Sinyal	Unit	1
26	Papan Tulis	Unit	1
27	Alat Kantor Lainnya	Unit	123
28	Kursi Besi / Metal	Unit	2
29	Meja Panjang	Unit	2
30	Meja ½ Biro	Unit	10
31	Kursi Rapat	Unit	71
32	Kursi Tamu	Unit	50
33	Kursi Putar	Unit	22
34	Meja Komputer	Unit	2
35	Sofa	Unit	2
36	Meubelair Lainnya	Unit	3

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
37	Mesin Penghisap Debu	Unit	1
38	AC Window	Unit	14
39	Ac Split	Unit	7
40	Alat Pendingin Lainnya	Unit	2
41	Televisi	Unit	49
42	Amplifier	Unit	1
43	Sound System	Unit	1
44	Unit Power Supply	Unit	1
45	Stabilisator	Unit	9
46	Camera Video	Unit	1
47	Tustel	Unit	6
48	Tangga Aluminium	Unit	1
49	Dispenser	Unit	4
50	Gordyn / Kray	Unit	3
51	Alat Pemadam Portable	Unit	5
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	2
54	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Unit	4
55	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	Unit	37
56	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Unit	1
57	Meja Operator	Unit	5
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	1
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Unit	11
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	32
62	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Unit	15
63	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Unit	10
64	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Unit	1
65	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	25
66	Lemari lainnya	Unit	2
67	Audio Amplifier	Unit	1
68	Microphone / Wireless Mic	Unit	2

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
69	Power Amplifier	Unit	1
70	Cable	Unit	1
71	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	16
72	Video Distribution Amplifier	Unit	5
73	Head Set	Unit	5
74	Video Monitor	Unit	1
75	Video Tape Recorder Portable	Unit	1
76	LCD Monitor	Unit	1
77	Video Mixer	Unit	1
78	Video Switcher	Unit	22
79	Camera Conference	Unit	1
80	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	Unit	21
81	Video Patch panel	Unit	1
82	Tripod Camera	Unit	3
83	Lighting Stand Tripod	Unit	1
84	Lensa Camera	Unit	2
85	Handy Talky	Unit	10
85	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Unit	2
86	Antena SHF Portable	Unit	5
87	Mainframe (Komputer Jaringan)	Unit	4
88	Mini Komputer	Unit	2
89	PC Unit	Unit	67
90	Laptop	Unit	14
91	Notebook	Unit	1
92	Hard Disk	Unit	10
93	Peralatan Mainframe Lainnya	Unit	6
94	Monitor	Unit	4
95	Printer	Unit	40
96	External / Pportable Hardisk	Unit	40
97	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	83
98	Server	Unit	18
99	Router	Unit	1

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
100	Hub	Unit	3
101	Kabel UTP	Unit	4
101	Wireless Access Point	Unit	4
102	Switch	Unit	2
103	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	43
104	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	1
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1
106	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Unit	1
107	Bangunan Menara Antena Microwave / Parabolic	Unit	1
<b>JUMLAH</b>			<b>1.020</b>

### c. Anggaran

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, maka pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9.439.411.326,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). Kemudian dengan adanya realokasi anggaran berkurang menjadi Rp.8.986.363.892,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 1.4.

Tabel 1.4

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.439.411.326,00</b>	<b>8.986.363.892,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.886.412.248,00</b>	<b>8.529.655.922,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.280.051.326,00	5.287.516.165,00
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.606.360.922,00	3.242.139.757,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>552.999.078,00</b>	<b>456.707.970,00</b>
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	452.999.078,00	421.707.970,00
5.2.5	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	100.000.000,00	35.000.000,00

### 1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023 disajikan berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Lampiran II. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023 sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang
- 1.2 Aspek Strategis
- 1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi
- 1.4 Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

#### BAB IV PENUTUP

Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, visi Kota Pontianak adalah:

**“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN  
YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”**

Maksud dari visi tersebut adalah:

**Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa

**Berwawasan lingkungan**

memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

**Cerdas**

kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dgn pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi

**Bermartabat**

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran, terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel

Untuk mewujudkan visi tersebut, diuraikan dalam 5 misi Pemerintah Kota Pontianak, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representative
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing

## 5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengampu misi 3 Pemerintah Kota Pontianak yaitu untuk Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dalam mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas adalah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien
2. Transparansi Informasi Publik

### **2.1.2 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka dilaksanakan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan melalui arah kebijakan dan program sebagai berikut:

#### A. Sasaran Strategis Pertama

**Tujuan :**

Meningkatkannya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

**Sasaran 1 :**

Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien.

**Arah Kebijakan:**

1. Mengoptimalkan penerapan nilai dengan metode tingkat kematangan SPBE e-government
2. Meningkatkan pengembangan jaringan informasi pembangunan berdasarkan e-government
3. Meningkatkan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi mendukung Smart City

4. Meningkatkan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak

**Program :**

1. Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

B. Sasaran Strategis Kedua

**Tujuan :**

Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat

**Sasaran 2 :**

Transparansi Informasi Publik

**Arah Kebijakan:**

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika
2. Mengintegrasikan data statistik Kota Pontianak dalam portal satu data
3. Mengoptimalkan Pusat Pengelolaan Informasi Daerah Kota Pontianak

**Program :**

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Penyelenggaraan Statistik Sektor

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian sasaran strategis. Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan.

Satuan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Kegiatan dan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan tabel 2.2.

**Tabel 2.1**

**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak  
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2023**

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2023	
			Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
1	2	3	4	6
Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks	3,31	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Persen	97	Rp2.248.318.237

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	1	<b>Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah</b>		<b>Domain / Sub Domain</b>	<b>31</b>	<b>Rp117.639.548</b>
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.	1.	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	dokumen	1	Rp108.496.458
	2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.	2.	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	1	Rp9.143.090
2	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	2.	<b>Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi</b>		<b>Aplikasi / Layanan Publik</b>	<b>1</b>	<b>Rp2.010.525.280</b>
	1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	2.	1.	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	unit	1	Rp1.675.417.529
	2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.	2.	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	unit	1	Rp39.950.000
	3. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.	3.	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	layanan	1	Rp46.450.000

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.	4.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	dokumen	1	Rp302.231.160
5.	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.	5.	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	dokumen	1	Rp31.000.000
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2.	6.	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	dokumen	1	Rp35.630.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Indeks Keamanan Informasi Pemerintah</b>			<b>Indeks</b>	<b>Baik</b>	<b>Rp119.696.987</b>
	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>3.</b>	<b>Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian</b>		<b>area</b>	<b>1</b>	<b>Rp109.731.987</b>
3.	1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.	1.	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokumen	1	Rp9.980.000

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.	2.	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	laporan	2	Rp10.995.000
3	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.	3.	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	laporan	20	Rp86.306.987
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.	4.	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Perangkat Daerah	6	Rp2.450.000
4.	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	4.		<b>Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)</b>	<b>persen</b>	<b>20</b>	<b>Rp9.965.000</b>
1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.	1.	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perangkat Daerah	6	Rp9.965.000
<b>Meningkatnya Transparansi Informasi Publik</b>		<b>Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik)</b>			<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan				
				Tahun 2023				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan program prioritas daerah</b>		<b>persen</b>	<b>96</b>	<b>Rp446.178.620</b>			
<b>5.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>5.</b>	<b>Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat</b>	<b>informasi</b>	<b>14</b>	<b>Rp446.178.620</b>	
	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.	1.	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	12	Rp41.100.000
	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.	1.	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	konten	12	Rp210.356.720
	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.	2.	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	dokumen	1	Rp15.975.000
	4	Pelayanan Informasi Publik	5.	3.	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	dokumen	12	Rp79.805.600
	5	Layanan Hubungan Media	5.	4.	Jumlah siaran pers yang dilakukan	layanan	4	Rp47.630.000
	6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5.	5.	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	dokumen	1	Rp36.485.000
	7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	5.	7.	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	dokumen	1	Rp14.826.300

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
					Tahun 2023	
					Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak</b>		<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>Rp253.320.500</b>
<b>6.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>6.</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate</b>	<b>data</b>	<b>1200</b>	<b>Rp253.320.500</b>
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6.	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	3	Rp48.315.000
	2. Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6.	2. Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	0	Rp -
	3. Membangun Metadata Statistik Sektoral	6.	3. Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	2	Rp34.990.000
	4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	6.	4. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	30	Rp44.975.000
	5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	6.	5. Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	1	Rp125.040.500

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak**  
**Urusan Penunjang Tahun 2023**

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
1		2	3	4	5
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>Presentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>Persen</b>	<b>96</b>	<b>Rp5.918.849.548</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100,00</b>	<b>20.201.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100,00	7.650.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	100,00	Rp1.485.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	100,00	1.980.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	100,00	4.644.600,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100,00	4.441.400,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>Rp5.209.597.165</b>

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	32	Rp5.005.706.165
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	17.600.000,00
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	181.710.000,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	850.000,00
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	4	3.731.000,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>49.430.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	49.430.000,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>268.691.415,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp7.017.064
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	130.761.251,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25.377.100,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8.880.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	96.656.000,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>318.634.470,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.980.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	60.796.390,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	252.858.080,00
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>unit</b>	<b>86</b>	<b>52.295.498,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	29.765.498,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	84	22.530.000,00

Total dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.986.363.892,00,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), sudah termasuk Gaji dan Tunjangan Pegawai.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam tahun 2023 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh atau dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja, program dan kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program dan kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan Pengukuran Kinerja yang mengacu pada penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, salah satu Sasaran tersebut adalah Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien dan Transparansi Informasi Publik.

#### ✓ **Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien**

##### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	Nilai	3,31	3,43	103,63%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika yakni Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien sedangkan untuk IKU berupa Indeks SPBE ditargetkan Tahun 2023 dengan nilai 3,31 dengan realisasi sebesar 3,43% atau 103,63%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian Tingkat realiasi kinerja program dan realisasi anggaran program maka dapat dilihat dan dikategorikan pada Tingkat Efisien tercapai dan tidak tercapai, untuk melihat uraiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2  
Realisasi Program Anggaran, Capaian Kinerja  
dan Tingkat Efisiensi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.248.318.237	2.159.853.887	96,07	99,77	-

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Program Penyelenggaraa Persandian Untuk Pengamanan Informasi	119.696.987	118.682.800	99,15	100	efisien

Dilihat pada tabel diatas dapat dilihat untuk realiasi program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 96,07% atau sebesar Rp.2.159.853.887,00 dari target anggaran sebesar Rp.2.248.318.237,00 dengan capaian kinerja 99,76% dan masih belum bisa dikategorikan efisiensi hal ini disebabkan capaian kinerja belum sampai 100%.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp.119.696.987,00 dan terealisasi sebesar Rp.118.682.000,00 atau 99,15% dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan dikategorikan efisien disebabkan capaian kinerja sudah mencapai 100% dan dapat mengefisiensikan anggaran.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang aman efektif dan efisien didukung oleh program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- Program Aplikasi Informatika

Pada Program Aplikasi Informatika dengan indikator Kinerja berupa Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE, dengan rumusan:

$$= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPBE}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Untuk tahun anggaran 2023, jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPBE adalah sebanyak 30 Perangkat Daerah dari total perangkat daerah sebanyak 31 perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pada tahun 2023, capaian kinerja untuk program pengelolaan aplikasi informatika adalah sebesar 99,77%. Sedangkan target kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 97%. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{96,77}{97,00} = 99,77\%$$

Untuk program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung oleh 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah ditargetkan sebanyak 31 domain/sub domain dengan realisasi sebesar 103,23% atau 32 domain/sub domain.

Dari kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan, meliputi :

- 1.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja pada indikator sub kegiatan ini adalah jumlah domain/sub domain pemerintah daerah yang dikelola sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100%.

Selain itu juga dilakukan propagasi layanan aplikasi dari usulan setiap Perangkat Daerah.

- 1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator pada kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

sebanyak 1 unit atau 100%. telah dilakukan koneksi jaringan lokal antar OPD dan pada tahun 2023 telah terkoneksi jalur antar OPD sebanyak 6 Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari kegiatan ini terlaksananya Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi sebanyak 1 aplikasi/layanan publik dan terealisasi sebesar 3 aplikasi/layanan publik atau 300%.

Dari kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan, meliputi :

#### 2.1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Indikator pada kegiatan jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit atau 100%. Selain itu juga dilakukan fasilitas layanan pusat data seperti celection, hosting tempat penyimpanan aplikasi dan internet.

#### 2.2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator pada kegiatan dengan Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan sebanyak 3 unit dan terealisasi sebesar 300% dari target sebanyak 1 unit. Adapun peningkatan aplikasi terdiri dari Elektronik Renumerasi Kinerja (ERK), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)



- 2.3. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Indikator pada kegiatan ini adalah Jumlah Aplikasi/Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebanyak 1 layanan atau 100%. Adanya penambahan integrasi aplikasi melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) daerah yaitu aplikasi Jepin dan berita pada Website Pemkot.



- 2.4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Indikator pada kegiatan Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City, dengan realisasi kinerja sebanyak 100% atau 1 dokumen. Dalam menunjang kegiatan pelaksanaan smart cityt telah dilakukan evaluasi sebanyak 2 kali. Evaluasi Penyelenggaraan dan implementasi smart city

meliputi 6 dimensi yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society; dan smart environment. selain itu setiap tahunnya ditetapkan 1 program quick win disetiap 6 dimensi smart city. Adapun kegiatan penunjang dalam dari pelaksanaan smart city.

- Focus Group Discussion Implementasi Pontianak Smart City dan Rencana Quick Win Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023



- Pembahasan Program Quick Win Smart City Tahun 2023 dan Persiapan Evaluasi Smart City Tahap I dan Tahap II Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 dan 6 Oktober 2023





- Penilaian Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahap I oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beserta Tim Penilai Pusat, tanggal 12 Juni 2023



## 2.5. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah, sebanyak 1 dokumen atau 100%. Telah dilaksanakannya penyediaan layanan secara virtual pada ruang Pontive Center selama 12 bulan.



## 2.6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE dengan capaian sebesar 100% atau 1 dokumen. Selain itu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam menunjang penilaian SPBE, seperti : Evaluasi Mandiri SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023.



Dilakukan Interviui Evaluasi SPBE Tahun 2023 oleh Tim Evaluator Eksternal Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2023



Penyusunan Arsitektur SPBE Kota Pontianak serta Penerapan Interoperabilitas Layanan Elektronik, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023



- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, mempunyai indikator kinerja Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi.

Untuk program Penyelenggaraan Persandian dimana Pengamanan Informasi, hasil Self Assesment Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah Baik.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan capaian sebesar 100%. Dari program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dan dijabarkan dalam 5 (lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari Indikator kegiatan ini jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian sebanyak 1 area atau sebesar 100%.

1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Indikator sub kegiatan adalah jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen atau 100%. Selain itu juga telah tersusunnya Draft Peraturan Wali Kota tentang Sistem Manajemen Kemanan Informasi.

1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian indikator pada sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar 100% atau 2 laporan.

1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik  
Keluaran pada kegiatan ini terlaksananya Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 20 laporan atau 100% dari target. Salah satu kegiatan ini berupa tandatangan elektronik.

1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Keluaran pada kegiatan ini terlaksananya jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan

informasi sebanyak 30 Perangkat Daerah atau 500% dari target sebanyak 6 Perangkat Daerah.

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Keluaran sub kegiatan ini terlaksananya jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi sebanyak 7 Perangkat Daerah atau 116,67% dari target sebanyak 6 Perangkat Daerah.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2022 dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan dimana target yang ditetapkan Tahun 2022 dan Tahun 2023 bernilai 3,31. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3.3  
Capaian Indeks SPBE Realisasi Tahun 2022 dan Target serta Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,28	3,31	3,43

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Sasaran Strategis Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks SPBE dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 3,28 terjadi peningkatan, pada tahun 2023

menjadi 3,43 dari target sebesar 3,31. Peningkatan yang terjadi pada Nilai SPBE terdapat pada nilai Domain Kebijakan SPBE, Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik berbasis Elektronik. Selain itu peningkatan juga terjadi pada semua aspek pada penilaian Indeks SPBE dan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Pontianak, dengan rekomendasi untuk penilaian ditahun berikutnya dan perlu mengoptimalkan indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ke arah tingkatan level yang maksimal.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Capaian kinerja indeks SPBE berdasarkan dokumen perencanaan strategis dari tahun 2021-2023 terdapat beberapa faktor penunjang dalam peningkatan nilai Indeks SPBE, meliputi : aspek Perencanaan Strategis SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya penerapan aspek Perencanaan Strategis SPBE yang umumnya sudah di reviu dan evaluasi, kemudian pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat pada penggunaan aplikasi berbagi pakai dan adanya integrasi antar aplikasi dengan aplikasi umum berbagi pakai lainnya pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SIPD, dan kearsipan melalui SRIKANDI sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Begitu pula pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat dengan adanya penggunaan aplikasi SPAN-LAPOR dan JDIH yang juga

merupakan aplikasi berbagi pakai yang sudah terintegrasi dengan aplikasi berbagi pakai lainnya.

Tabel. 3.4  
Realisasi Indeks SPBE Berdasarkan Perencanaan Strategis  
Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,31	3,28	3,43	3,31

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Indeks SPBE untuk Tahun 2021 sebesar 3,31%, penilaian tersebut pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3,28 sedangkan untuk Tahun 2023 terjadi peningkatan Kembali menjadi 3,43%. Turunnya nilai Indeks SPBE Pada Tahun 2022 itu disebabkan penilaian oleh asesor hanya berdasarkan bukti dukung yang telah diuploadkan dan tanpa melalui wawancara, sehingga tidak ada kesempatan penambahan pernyataan penegasan maupun penambahan bukti dukung melalui sesi wawancara. Pemerintah Kota Pontianak tidak diwawancara dikarenakan pada Tahun 2022 Kota Pontianak tidak termasuk lokus yang dilakukan penilaian, jadi hanya atas permintaan sendiri untuk tetap dilakukan evaluasi oleh evaluator eksternal.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)  
Penilaian Indeks SPBE apabila dilihat perbandingan dengan nilai Tingkat Nasional maka penilaiannya telah tercapai, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel. 3.5  
Perbandingan IKU Indeks SPBE Antara Realisasi Dengan  
Target Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,43	2,79

Realisasi pada Tahun 2023 pada Penilaian Indeks SPBE sebesar 3,43, jika dibandingkan dengan Target Nasional pada Tahun 2023 sebesar 2,79 maka penilaian Indeks SPBE telah mencapai dari target Tingkat Nasional maupun dari target Tingkat Kota, dimana untuk Tingkat Kota nilai Indeks SPBE sebesar 2,50.

5. Apabila penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan hasil pekerjaan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan Upaya mengatasi permasalahannya, adapun rincian permasalahan dan solusi dari permasalahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 3.6  
Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum memiliki/disusunnya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Kota Pontianak yang	Meningkatkan rapat koordinasi dan dibentuk Timdalam rangka percepatan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Pontianak. Hal ini

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	d disesuaikan dengan Arsitektur & Peta Rencana SPBE Nasional	<p>dilakukan dalam rangka meningkatkan indicator tingkat kematangan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Pontianak, agar penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan secara matang, terencana, terstruktur dan bersinergi dengan Arsitektur SPBE Nasional (Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional).</p> <p>Meningkatkan kolaborasi dalam Penerapan SPBE pada level tertinggi aspek Penyelenggaraan SPBE sehingga lebih komprehensif dan lebih optimal</p>
2	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Perlu dilaksanakannya Manajemen Resiko SPBE Kota Pontianak sesuai dengan pedoman dan format yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3	Belum dilaksanakannya Audit Infrastruktur SPBE secara komprehensif sesuai dengan pedoman baik oleh auditor TIK Internal IPPD maupun auditor TIK Eksternal Tersertifikasi.	Melalui Tim Koordinasi dan Evaluator Internal SPBE akan berkoordinasi membentuk Tim Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Jaringan intra yang terbangun masih pada 8 OPD yang berada lingkungan Komplek Kantor Wali Kota Pontianak	Tahun 2024 akan dilakukan pengembangan jaringan Intra pada OPD-OPD di jalan Aliyang, Sutoyo dan A. Yani sebagian. Adapun OPD-OPD tersebut antara lain: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Diskumdag, DPUPR, Dinkes, Dinsos, Disporapar, DPMPTSP, Kec Pontianak Selatan, Disdikbud, Disdukcapil, DPRKP, Bapenda, BKAD

#### Hambatan

- Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam Pelaksanaan e-government
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah

#### Upaya

- Adanya penambahan anggaran dalam pengembangan jaringan dan aplikasi agar dapat terintegrasi.
- Penambahan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

#### ✓ **Transparansi Informasi Publik**

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	Baik	Baik	100,00%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika yakni Meningkatnya Transparansi Informasi Publik sedangkan untuk IKU berupa Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik ditargetkan Tahun 2023 dengan kategori nilai Baik dengan realisasi Baik sehingga capaian kinerja menjadi 100,00%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian Tingkat efisiensi dapat dilihat dari target kinerja program dan penggunaan anggaran untuk tahun 2023, dimana pencapaian target kinerja program tersebut dapat dikategorikan Efisien, hal ini dapat dilihat dimana capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik mencapai 166,67% dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 100%, sementara realiassi keuangannya dibawah 100%. Adapun detail rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi  
pada Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dan  
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Statistik  
Sektoral Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Transparansi Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	446.178.620	444.055.790	99,52	166,67	efisien
2		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	253.320.500	251.624.100	99,33	100	efisien

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan transparansi informasi publik didukung oleh 2 program yaitu program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.446.178.620- dan program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.253.320.500,-.

• **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik memiliki indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, dengan rumusan penilaian indikator:

$$= \frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas}}{\text{Jumlah masyarakat usia produktif}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, untuk program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai target kinerja 166,67% dan realisasi kerjanya adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{52.340}{31.402} = 166,67\%$$

Capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebesar 166,67% yang diperoleh dari perbandingan target dan realisasi kinerja. Melonjaknya realisasi kinerja program ini lebih disebabkan karena pada saat penentuan target, jumlah penduduk yang ditargetkan bukan jumlah penduduk Kota Pontianak secara keseluruhan, tetapi hanya sejumlah 31.402 orang. Sehingga dalam pelaksanaan program, yang dicapai melebihi target yang sebelumnya ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tahun 2023, jumlah penduduk Kota Pontianak adalah sebanyak 673.400 jiwa, dimana untuk usia produktif (15-65 Tahun) adalah sebanyak 476.636. Jika yang menjadi target kinerja adalah penduduk usia produktif, maka capaian kinerja program Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebesar 10,98%.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan serta 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 166,70%. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan, terdiri dari:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Capaian kinerja pada kegiatan ini terlaksananya jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada Masyarakat sebanyak 14 informasi atau 100%.

- 1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Keluaran pada sub kegiatan ini terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Analisa Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebanyak 12 dokumen dengan capaian 100%.

1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Capaian pada sub kegiatan ini terlaksananya jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi sebesar 100% atau sebanyak 12 dokumen. Adapun jumlah postingan menurut jenis konten selama 12 bulan dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Konten	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Pemberitaan	58	46	46	25	32	56	20	53	94	70	54	52	606
Informasi/Pemberitahuan	32	20	56	51	46	46	8	20	28	36	38	26	407
Ucapan	10	10	18	9	14	11	15	12	13	21	6	17	156
Konten Kreatif	36	40	10	16	20	17	32	38	29	35	23	24	320
Infografis	2	0	2	1	0	0	75	69	52	0	0	0	201
Dan lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>116</b>	<b>132</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>194</b>	<b>218</b>	<b>162</b>	<b>121</b>	<b>119</b>	<b>1694</b>



1.3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi sebesar 100% atau 1 dokumen.

#### 1.4. Pelayanan Informasi Publik

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi sebanyak 13 dokumen dan terealisasi sebanyak 13 dokumen atau 100%.

#### 1.5. Layanan Hubungan Media

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah siaran pers yang dilakukan sebanyak 4 layanan atau 100%. Sub kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada Masyarakat tentang informasi Pembangunan Kota Pontianak, melalui siaran pers berupa iklan layanan masyarakat yang bekerjasama dengan Radio Mujahidin, Radio Sonora dan I News TV dan Videotron.

#### 1.6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah dengan capaian sebesar 100% dari target sebanyak 1 dokumen.

- Pelatihan Pemanfaatan Platform Digital Kemitraan Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Pontianak yang diikuti kurang lebih 100 orang peserta utusan dari Komunitas KIM yang ada di Pontianak.



### 1.7. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%.

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Pada program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki indikator kinerja berupa Presentase Tingkat terselenggaranya Statistik Sektoral Kota Pontianak, terdiri dari Indikator Penilaian Data Statistik Sektoral.

Capaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2023 adalah sebesar

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100 + 100 + 100 + +100}{400} = 100\%$$

Target Kinerja program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2023 sebesar 95% dapat dicapai dan capaian realisasi program penyelenggaraan statistik sektoral adalah sebesar 100%. Sehingga untuk kinerja 2023 adalah sebesar 105%.

Dalam menunjang pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik dilaksanakan sebanyak 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja pada kegiatan ini terlaksananya jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate sebanyak 1.200 data dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan capaian kinerja sebesar 100% atau sebanyak 3 dokumen. Adapun dokumen yang telah tersusun yakni dokumen Updating Data Statistik Sektoral Tahun 2023, dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) Tahun 2022 bekerjasama dengan BPS Kota dan dokumen Data Dinamis Tahun 2023.

- Rapat koordinasi terkait dengan pengumpulan data dalam penyusunan Dokumen Updating Data Statistik Sektoral Tahun 2023



- Rapat Koordinasi dalam rangka fasilitasi pengumpulan data Daerah Dalam Angka (DDA) Tahun 2022 bersama Badan Pusat Statistik Kota Pontianak



## 1.2. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun dengan capaian sebesar 100% atau 2 dokumen. Adapaun dokumennya terdiri

dari dokumen metadata indikator tahun 2023 dan metadata kegiatan tahun 2023.

- 1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  
Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS dengan capaian sebesar 100% atau sebanyak 30 orang. Tahun 2023 terlaksananya Bimtek Metadata dan Rekomendasi Kegiatan Statistik.



- 1.4. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah  
Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun dengan capaian

sebesar 100% atau sebesar 1 dokumen. Adapun hasil kegiatan dalam menunjang sub kegiatan ini terdiri dari penyusunan profil kota, penyusunan publikasi panduan penggunaan aplikasi E-walidata, Publikasi Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektorial pada Aplikasi Romantik BPS RI dan Publikasi Penerapan Standar Data Statistik Pemerintah Kota Pontianak.

- Kegiatan penyusunan publikasi panduan penggunaan aplikasi E-walidata



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mencapai nilai Baik. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 3.8  
Capaian Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik  
Realisasi Tahun 2022 dan Target serta Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Informasi Publik dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi Tahun 2022 dengan kategori nilai Baik dan Pada Tahun 2023 dengan nilai Baik sehingga mencapai 100%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel. 3.9  
Realisasi Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik  
Berdasarkan Perencanaan Strategis  
Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Baik	Baik

Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target kategori Baik dan realisasi dengan kategori Baik atau 100%. Selanjutnya untuk Tahun 2022 dan Tahun 2023 terealisasi dengan kategori Baik dengan capaian 100%. Untuk Tahun 2023 ukuran Indikator Indeks Layanan informasi dan Komunikasi Publik dapat dilihat pada penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikelompokkan kedalam 6 jenis layanan yang terdiri dari Layanan Pengaduan sebesar 96,25 (Sangat Baik), Layanan Informasi dengan nilai 89,76 (Sangat Baik), Layanan Data sebesar 89,32 (Sangat Baik) dan jenis Layanan Lainnya sebesar 85,00 (Baik), sehingga jumlah capaian Surve Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2023 dengan kategori Baik atau dengan nilai 88,25.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel. 3.10  
Perbandingan IKU Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Antara Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	-

Berdasarkan tabel diatas untuk perbandingan antara realiasi indeks layanan informasi dan komunikasi publik dengan target nasional hasilnya tidak ada, hal ini disebabkan tidak adanya target nasional, sedangkan untuk realiasi IKU tahun 2023 dengan kategori nilai Baik.

5. Apabila penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan  
Dalam melaksanakan hasil pekerjaan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan Upaya mengatasi permasalahannya, adapun rincian permasalahan dan solusi dari permasalahan dapat dilihat sebagai berikut :  
Tabel permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Perlu dilakukan penyebarluasan informasi dan komunikasi terhadap masyarakat tentang informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) baik yang sudah terbentuk maupun yang masih terdata atau kurang aktif.</li> <li>• Dilakukan sosialisasi terhadap Masyarakat terkait dengan pengembangan wawasan tentang informasi publik</li> </ul>
2.	Masih banyaknya data yang belum sesuai dengan standar data yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Perlu dilakukan pelatihan/bimtek terkait dengan pengolahan data statistik sektoral yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Masih terdapat beberapa Indikator dalam kategori rendah pada penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Melaksanakan peningkatan pada Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang terdiri dari Lima Domain, 19 Aspek dan 38 Indikator, Salah Satu Domain yang Diampu Adalah Sistem Statistik Nasional (SSN) dengan cara dilakukan evaluasi dan review secara berkala oleh pembina data, walidata dan koordinator.

#### Hambatan

Kurangnya kesadaran Organisasi Perangkat Daerah dalam pemenuhan daftar data dan daftar data prioritas Kota Pontianak

Upaya

Perlu dilakukan koordinasi secara rutin dan kontinyu terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung dengan program kerja yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan, yang di anggaran yang tertuang dalam DPA Dinas Tahun 2023. Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2023 sebesar Rp.9.439.411.326,- kemudian dilakukan refocusing anggaran sehingga anggaran berkurang sebesar Rp.453.047.434,- dan menjadi Rp.8.986.363.892. Dengan adanya perubahan anggaran ini maka ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan beberapa sub kegiatan mengalami perubahan juga sehingga capaian kinerjanya juga akan dilakukan perubahan.

Tabel.3.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.918.849.548,00	5.476.113.868,00	92,52
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	446.178.620,00	444.055.790,00	99,52
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.248.318.237,00	2.159.853.887,00	96,07
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	253.320.500,00	251.624.100,00	99,33
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	119.696.987,00	118.682.800,00	99,15
<b>Total</b>		<b>8.986.363.892,00</b>	<b>8.450.330.445,00</b>	<b>94,04</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada total anggaran program sebesar Rp.8.450.330.445,00 atau 94,04% dari target anggaran sebesar Rp.8.986.363.892,00. Adapun anggaran perprogram sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.5.895.472.882,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.5.918.849.548,00, dengan demikian terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.23.376.666,00.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 538.943.720,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 446.178.620,00, dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.92.765.100,00.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 2.483.287.237,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.2.248.318.237,00, dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.234.969.000,00.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.399.990.500,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.253.320.500,00, dengan demikian terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.146.670.000,00.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.121.716.987,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.119.696.987,00, dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.2.020.000,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hampir semua pada sub kegiatan pendukung terealisasi sebesar 90% keatas, namun ada satu kegiatan yang realisasinya 86,19% yakni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hal ini disebabkan adanya selisih pembayaran pada perjalanan dinas dan evaluasi SPBE yang dilakukan KEPMENPAN dilaksanakan secara zoom meeting.

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik rata-rata realisasi sub kegiatan mencapai 100% dan 90%, Adapun rincian belanja yang tidak dapat

terserap 100% adalah pembayaran iuran asuransi Kesehatan untuk Non ASN atau tenaga PJLP.

Realisasi Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 96,07%, namun dari realisasi tersebut terdapat beberapa sub kegiatannya yang serapan anggarannya rendah dibawah 90%, yakni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Pengembangan sebesar 75,39% dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas sebesar 83,70%. Serapan yang rendah tersebut disebabkan belanja modal peralatan personal computer dan belanja modal peralatan jaringan hal ini dikarenakan setelah dilakukan pengecekan pada sistem e-katalog untuk sebagian barang atau peralatan yang akan dibelanjakan tersebut ternyata telah mengalami kenaikan harga dari harga yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga Sebagian peralatan personal computer dan peralatan jaringan tidak dapat dibelanjakan dikarenakan anggaran tidak mencukupi.

Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral realisasi anggarannya sebesar 99,33%, ini berarti hampir semua sub kegiatannya mencapai 100%. Pada program ini terdapat satu sub kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan anggarannya ditiadakan dikarenakan pengurangan anggaran.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan realisasi anggaran sebesar 99,15%, berarti sub kegiatan ini rata-rata mencapai 100%, dengan kinerja pengamanan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pontianak seperti agenda rapat-rapat koordinasi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023, sesuai dengan bidang tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak. Untuk mewujudkan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berkontribusi untuk pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2023 capaian kinerja program menunjukkan rata-rata sebesar 94,68% sedangkan capaian kinerja sub kegiatan menunjukkan rata-rata sebesar 109,98%. Dana yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan seluruh program / kegiatan / sub kegiatan adalah sebesar Rp.8.450.330.445,- atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp.8.986.363.892,-. Target kinerja outcome maupun output yang telah ditetapkan pada Renstra 2020-2024 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai.

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis pada bab terdahulu, maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, telah dapat merealisasi pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2023. Adapun pencapaian secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien  
Untuk meningkatkan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang aman efektif dan efisien didukung oleh anggaran sebesar Rp.2.368.015.224,- dan terealisasi sebesar Rp.2.278.536.687,- atau 97,61%. dengan tingkat capaian kinerja sasaran strategis sebesar 96,77% dimana target nilai SPBE 3,31 dapat dicapai 3,43. Capaian ini dapat dikatakan **Sangat Berhasil** dan untuk tingkat efesiensi pengelolaan anggaran sebesar 95,84% atau dapat di kategorikan **Sangat Efisien**.
- b. Sasaran Strategis Transparansi Informasi Publik  
Untuk meningkatkan transparansi informasi publik didukung oleh anggaran sebesar Rp.699.499.120,- dan terealisasi sebesar Rp.695.679.890,- atau 99,43%. dengan tingkat capaian kinerja sasaran strategis sebesar 130,84%. Capaian kinerja ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil** dan untuk tingkat efesiensi pengelolaan anggaran dapat di kategorikan **Sangat Efisien** dengan nilai sebesar 172,80%.
- c. Urusan penunjang pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung oleh 1 program dimana pelaksanaan program tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.918.849.548,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.476.113.868,- atau 92,52%. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100,00% dari capaian ini dapat kategori **Sangat Berhasil** dan untuk tingkat efesiensi pengelolaan anggaran dapat di kategorikan Sangat Efisien dengan nilai sebesar 92,52%.

Secara umum realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2023 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

## 4.2 Saran

1. Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak pada tahun 2023 mempunyai beberapa kendala. Untuk pelaksanaan pengadaan barang, perubahan harga barang serta tidak tersedianya barang yang dibutuhkan menjadi salah satu faktor penghambat realisasi kegiatan maupun anggaran. Walaupun secara keseluruhan pencapaian kinerja yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak dapat dilaksanakan secara baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Pelaksanaan penyebaran informasi kepada masyarakat yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, berubah pelaksanaannya. Penyebaran informasi dilaksanakan melalui media-media online berupa media social, website dan lainnya, tidak menggunakan media konvensional lainnya. Minimnya anggaran juga menyebabkan kurang optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat.
3. Untuk tetap dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan, diantaranya:
  - a. Perlu dilakukan peningkatan kapabilitas ASN dengan bimbingan teknis dan pelatihan teknis maupun umum
  - b. Pembangunan jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu komponen penting penilaian SPBE, sehingga perlu mendapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk dapat menyediakan jaringan intra pemerintah daerah.
  - c. Mengoptimalkan peran masyarakat yang sudah terbentuk melalui fasilitasi kegiatan yang tertuang dalam program kebijakan pemerintah.
  - d. Evaluasi intensif dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sehingga dapat mengantisipasi hambatan / masalah dalam pelaksanaan.



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK